ONOMI
ANGUNAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN DAERAH TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI OTONOMI FISKAL DAERAH DI WILAYAH OGAN KOMERING ULU (KABUPATEN OKU INDUK, KABUPATEN OKU TIMUR DAN KABUPATEN OKU SELATAN)

OLEH

HEFRI SYOFRIANI

01033120007

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana ekonomi

1/1

S
336.07
Syo
a
2007

R 15622
15984

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN DAERAH TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI OTONOMI FISKAL DAERAH DI WILAYAH OGAN KOMERING ULU (KABUPATEN OKU INDUK, KABUPATEN OKU TIMUR DAN KABUPATEN OKU SELATAN)

OLEH

HEFRI SYOFRIANI

01033120007

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana ekonomi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: HEFRI SYOFRIANI
NIM	: 01033120007
JURUSAN	: EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN DAERAH TERHADAP DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH DI WILAYAH OGAN KOMERING ULU

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal Januari 2007 Ketua Panitia:

Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc.
Nip: 131411409

Tanggal 30 Januari 2007 Anggota :

Drs. Hennys Mulia, MA.
Nip: 131790698

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN DAERAH TERHADAP DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH DI WILAYAH OGAN KOMERING ULU

Diajukan Oleh :

HEFRI SYOFRIANI

01033120007

Telah dipertahankan didepan panitia ujian komprehensif
Pada tanggal 13 Pebruari 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif

Ketua	Anggota	Anggota
Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc	**Drs. Hennys Mulia, M. A**	**Drs. Suhel, M.Si**
Nip : 131411409	**Nip : 131790698**	**Nip : 131993979**

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Taufiq Marwa, M.Si
Nip : 132050493

Motto :

"Sebuah Prestasi Bukanlah Tercipta Karena Faktor Kebetulan dan Keberuntungan Semata, Tetapi Diraih dengan Jerih Payah dan Pengorbanan yang Sepadan"

Kupersembahkan Untuk :

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Kakak-kakakku Tersayang*
- *Kekasihku Tersayang*
- *Teman-Teman Angkatan 2003*
- *Almamaterku Yang Tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Penerimaan Daerah Terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Ogan Komering Ulu (Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten OKU Selatan).

Pokok dari isi skripsi ini menjelaskan Derajat Otonomi Daerah Ogan Komering Ulu yang ditekankan pada derajat desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal. Hal ini sangat menarik untuk dikaji mengingat masih kecilnya kontribusi PAD baik dari pembiayaan pembangunan maupun APBD secara keseluruhan.

Sistematika penyajian skripsi hasil peneltian ini dibuat dalam 4 (empat) Bab dengan urutan : Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Wilayah Ogan Komering ulu, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan ataupun kesalahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatnya bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Januari 2007

Hefri Syofriani

UCAPAN TERIMA KASIH

Penilis mengucapkan terima kasih yang sebasar-besarnya dengan setulus hati, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- Allah SWT yang selalu menjadi penuntun dan penerang jalan hidupku
- Bapak **Dr. Syamsurijal. Ak** selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bapak **Dr. Taufiq Marwa, M.Si** selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
- Bapak **Drs. Suhel, M.Si** selaku pembimbing akademik.
- Bapak **Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc** selaku Ketua Panitia Pembimbing skripsi yang telah membantu memberikan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
- Bapak **Drs. Hennys Mulia, M.A.** selaku Anggota Panitia Pembimbing skripsi.
- Bapak **Drs. Suhel, M.Si** selaku dosen penguji.
- Dosen-dosen Fakultas Ekonomi, khususnya jurusan ekonomi Pemnagunan yang telah berjasa dalam memberian ilmu dan pendidikan kepada penulis selama dibangku kuliah
- Saudara Seperjuangan dalam Penelitian dan Skripsi **(etty, why, lita, rena,pipit, bunga dan nia).**
- Saudara yang memberikan banyak dukungan **(Usnul, Mbak Susi, Yuk Ita, Lies, Piko, Nia, Anja dan lainnya).**
- Seluruh teman-teman angkatan 2003 jurusan ekonomi pembangunan yang telah memberikan perhatian dan dukungannya.

Dan penulis menyampaikan ucapan khusus yang dipersembahkan kepada :

- Kedua orangtuaku tersayang *(Lina dan Gani)* sebagai sumber impirasi, semangat dan keberanian penulis untuk tetap tegar menghadapi berbagai cobaan dan terus maju menaklukan rintangan.
- Tuk *kekasih* ku, yang telah memberikan perhatian dan waktunya, aku akan selalu menunggumu.
- Kakakku tersayang *(Eti dan Eni)* yang selalu memberikan dukungan dan menjadi contoh yang baik bagi penulis untuk menjadi manusia yang berguna.
- Seluruh keluarga, dan para tetangga yang telah memberikan perhatian agar penulis sukses.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan Skripsi ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Persembahan iv
Kata pengantar v
Ucapan Terima Kasih vi
Daftar Isi viii
Daftar Tabel x
Abstraksi xii

BAB. I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Perumusan Masalah I-6
1.3. Tujuan penelitian I-6
1.4. Manfaat penelitian I-7
1.5. Kerangka Teori I-7
1.6. Penelitian Terdahulu I-9
1.7. Metodologi Penelitian I-10
1.7.1. Ruang Lingkup Penelitian I-10
1.7.2. Data dan Sumber Data I-10
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data I-11
1.7.4. Teknik Analisa I-11
1.8. Konsepsional Variabel Operasional I-13

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN OKU
2.1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah II-1

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 70434
TANGGAL : 27 MAR 2007

2.2. Keadaan Alam II-2
2.3. Wilayah Administrasi..... ..... II-2
2.4. Penduduk dan tenaga Kerja..... ..... II-5
2.4.1.Penduduk. II-5
2.4.2. Tenaga Kerja II-9
2.5. Keadaan Perekonomian Kabupaten Ogan komering Ulu II-10
2.5.1. Pertumbuhan Ekonomi..... .... II-10
2.5.2. Perkembangan Produk Domestik regional Bruto..... II-11
2.5.3. Pendapatan Perkapita II-13
2.6. Keadaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu II-14
2.6.1. Perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah... II-14
2.6.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah II-14

BAB III. ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN DAERAH..... .... III-1

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan IV-1
4.2. Saran..... .... IV-2

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten OKU II-4

2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten OKU Tahun 2004 ..... II-6

2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten OKU Timur Tahun 2004 ..... II-7

2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2004 ..... II-9

2.5 Perkembangan PDRB Kabupaten OKU Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan II-12

2.6 Perkembangan Pendapatan perkapita di Kabupaten OKU (dengan migas) II-13

2.7 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten OKU II-16

3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten OKU 1995-2004 ..... III-4

3.2 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten OKU 1995-2004 ..... III-5

3.3 Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Total APBD III-8

3.4 Kontribusi pad Terhadap Total Pengeluaran Rutin Kabupaten OKU III-9

Kontribusi PAD + BHPBP Terhadap Pengeluaran Rutin III-9

3.5 Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Perkapita Kabupaten OKU 1995-2004 . III-12

3.6 Kebutuhan Standard Fiskal Sumatera Selatan Tahun 1995-2004 ..... III-12

3.7 Indeks Pelayanan Publik Perkapita Kabupaten OKU III-13

3.8 Kapasitas Fiskal Standard Sumatera Selatan III-15

3.9 Kapasitas Fiskal Standard Kabupaten OKU III-15

3.10 Pertumbuhan PAD dab PDRB Kabupaten OKU Tahun 1995-2004 ..... III-17

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat penerimaan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat menerangkan besar kecilnya derajat desentralisasi, bantuan dan posisi fiskal Kabupaten Ogan Komering Ulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. Kerangka pemikiran yang mendasari kajian terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain : 1. Derajat Desentralisasi Fiskal, 2. Kebutuhan Fiskal, 3. Kapasitas Fiskal, 4. Upaya Fiskal. Teknik analisis menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Derajat Desentralisasi fiscal selama kurun waktu sepuluh tahun (1995-2004) sebesar 3 %, sedangkan kontribusi PAD + Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak terhadap PDRB sebesar 17 % yang berarti ketergantungan pemerintah Kabupaten terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Kebutuhan Fiskalnya dilihat dari PAD sebesar 5 % jika ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mencapai 27 %. Kapasitas Fiskal relatif baik jika dibandingkan dengan Standard Fiskal rata-rata Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, dan untuk Posisi Fiskal jika digunakan PDRB konstan sebesar 13,95 % dan bila menggunakan PDRB berlaku sebesar 2,0 %.

ABSTRACT

The purpose by doing this research are to analyze area acceptance in Ogan Komering Ulu. The expectation is to become an information that could explained how small/big the degree effect of decentralization, fiscal position and aid of Ogan Komering Ulu. All of data that used data used based on secondary data from Departement of State Income (DISPENDA) OKU, Beareau Investigation of Statistics (BPS) and other related resorts.An outline which founded to area acceptance in Ogan Komering Ulu which is for example : 1. Fiscal Decentralization Degree, 2. Fiscal Needs, 3. Fiscal Capacity and 4. Fickal Effort. Technical analysis by using the description of qualitative approximation.The result indicated that the Degree of Fiscal Decentralization during range of time ten years (1995-2004) to the amount of 3 %, whereas the amount from PAD Contribution + tax and non tax share portion to PDRB around 17 % that mean the higher Dependent of Regency Governmant to Central Governmant. The amount of fiscal needs looking from PAD is 5 5 if adding by share portion from tax and non tax reach to 27 %. Fiscal Capacity relatively good if it compare with standart of fiscal average regency/town around South Sumatera, and for Fiscal position if using PDRB constant is 13,95 5 and if using current available PDRb is around 2,0 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan-tuntutan otonomi daerah nampak semakin kuat sebagai bagian dari berlangsungnya proses demokratisasi baik di bidang politik maupun ekonomi. Daerah dengan keanekaragamannya mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat menentukan nasib mereka sendiri melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya. Keinginan untuk dapat menentukan nasib sendiri di masing-masing daerah juga nampak dengan semakin menjamurnya Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, serta adanya tuntutan kewenangan politis yang lebih besar bagi daerah (Prasetijono, 2000; 16)

Wilayah Ogan Komering Ulu merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber pendapatan daerahnya. Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah tersebut menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintah daerah (Musyrif, 1999; 17) meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah
c. Lain-lain pendapatan yang sah

Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri, oleh karena itu daerah mempunyai wewenang penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara optimal. Kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah daerah dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD. Sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan diusahakan tingkat pertumbuhannya makin menurun.

Kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah seoptimal mungkin di dalam membelanjai diri sendiri. Dengan kata lain, diusahakan agar pemerintah daerah mempunyai cukup sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya terutama penggalian sumber-sumber dana yang potensial di daerah dengan tetap menjamin agar pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional. Sementara itu, kebijaksanaan di bidang pengeluaran pada prinsipnya diarahkan agar dapat memberikan pengaruh positif yang besar kepada perekonomian daerah.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, maka sistem pemerintahan dan otonomi daerah pun mengalami pergeseran atau perubahan dimana selama ini sistem pemerintah lebih banyak mengarah pada sentralistik. Maka dengan telah di undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

hal tersebut akan menjadikan sistem pemerintahan lebih banyak mengarah pada desentralistik dan akan menyebabkan otonomi daerah diperluas, baik jangkauan maupun kewenangannya.

Akibatnya dengan diperluasnya otonomi daerah tersebut maka pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun komponen-komponen sumber penerimaan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
c. Pinjaman Daerah, dan
d. Lain-lain penerimaan yang sah

Otonomi daerah adalah suatu kebijakan atau strategi untuk memberdayakan dan memandirikan daerah. Untuk itu syarat yang paling penting untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah agar terwujudnya suatu struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat dan dapat di andalkan.menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu ditetapkan Undang-Undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Komponen sumber penerimaan daerah menurut Bab IV pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan, dan

c. Lain-lain Pendapatan

Konsekuensi dari pelaksanaaaan kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2001; 21)

Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET UPT PERPUSTAKAAN

masyarakat, maka peranan data pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah mempunyai hak atau diberi otonom baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing Pemberian otonomi dititik beratkan pada Daerah Tingkat II dalam hal ini kabupaten atau kotamadya. Pertimbangannya adalah model daerah otonomi itu Daerah Tingkat II merupakan paling dekat dengan masyarakatnya, karena Daerah Tingkat II lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat (Ali Akbar, 2002; 4).

Di dalam pelaksanaan otonomi bagi daerah Tingkat II seperti Kabupaten OKU, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi serta masih banyak juga urusan yang belum sepenuhnya diserahkan kepada Daerah Tingkat II. Peningkatan jumlah urusan tersebut nampaknya bergantung pada kesiapan dan kemampuan daerah serta inisiatif propinsi dari daerah tersebut.

Kabupaten Ogan Komering Ulu yang luas wilayahnya 13.661 km^2 merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam potensial, dapat digali secara professional guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Selama kurun waktu sepuluh tahun anggaran (1994/1995-2004) kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesat 7,5%, tetapi jika dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun kontribusi PAD semakin menurun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih besar, ini berarti kontribusi PAD terhadap total APBD masih kecil. Sehubungan dengan itu wilayah OKU harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan mengembangkan potensi penerimaan daerah khususnya meningkatkan PAD.

Di sisi lain daerah Tingkat II masih sangat tergantung pada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, karena penerimaan yang bersumber dari PAD masih belum dapat diandalkan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul " Analisis Tingkat Penerimaan Daerah Terhadap Derajat Desentralisasi Otonomi Fiskal Daerah di Wilayah Ogan Komering Ulu"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka permasalahan yang diambil adalah Menganalisis Tingkat Penerimaan Daerah Terhadap Derajat Desentralisasi Otonomi Fiskal Daerah di Wilayah Ogan Komering Ulu.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis tingkat penerimaan daerah terhadap derajat desentralisasi otonomi fiskal Daerah di Wilayah Ogan Komering Ulu.

1.4. Manfaat Penulisan

Semua kegiatan penulisan yang dilakukan penulis dan dituangkan dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

1. Bagi pemerintah daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijaksanaan mengenai penerimaan daerah.
2. Bagi mahasiswa diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam penyusunan laporan atau skripsi.

1.5. Kerangka Teori

Tujuan otonomi daerah (Smith, 1985) dalam analisa CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat yang dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintah Daerah. Dari Kepentingan Pemerintah Pusat, tujuan utamanya adalah pendidikan potitik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan (Halim, 2001: 23) sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Political equality, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal ataupun daerah.

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya jika di lihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung pada kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah,terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalanny apemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peling tidak ada empat parameter yang menjadi faktor penilaian dan perlu dievaluasi pada tingkat keberhasilannya. Keempat faktor tersebut adalah (a) kemampuan keuangan daerah, (b) kemampuan sumber daya manusia, (c) kemampuan sumber daya alam, (d) kemampuan institusi. (Fattah, 2001; 4).

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Zahari (2001), tentang Analisa Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Jambi mengemukaakan bahwa pendaptan per kapita, keragaman sumber penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD.

Penelitian Hasan (2000), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak hiburan di Kota Palembang mengemukakan bahwa jumlah penduduk, pertumguhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, jumlah tempat hiburan dan keringanan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Bamim (2002), tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Proviinsi Sumatera Selatan mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah kendaraan bermotor, secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak saerah, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Yuliati (1999) mengenai analisis kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah Dikabupaten Malang menyatakan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Dearah selama kurun waktu lima tahun (1995-1999) sebesar 15 %, sedangkan proporsi PAD ditambah BHPBP terhadap PDRB sebesar 29 %. Ini menunjukan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Jika dilihat dari kemempuan PAD dalam mendanai belanja rutin daerah maka rata-rata selama

lima tahun sebesar 32 % dan jika ditambanh dengan BHPBP sebesar 62 %. Ini berarti pembiayaan belanja rutin masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Kabupaten Malang memiliki Kapasitas Fiskal yang relatif baik dibandingkan dengan standar fiskal rata-rata Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan terbatas pada ruang lingkup wilayah Ogan Komering Ulu (Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan). Di mana pembahasannya adalah mengenai Sumber Penerimaan Daerah tahun anggaran 1994-2004, serta permasalahan yang berhubungan dengan variabel tersebut.

1.7.2. Data dan Sumber Data

Data yang diolah dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) OKU dan Badan Pusat Statistik (BPS) OKU, BAPPEDA OKU, dan instansi-instansi terkait lainnya. Selain pengumpulan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan landasan teori penelitian sebelumnya dan model analisis dilakukan Study Pustaka (Library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui buku-buku literatur, Badan Pusat Statistik OKU, Dinas Pendapatan Daerah OKU, BAPPEDA OKU.

1.7.4. Teknik Analisis

Dalam menganalisis masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif, dimana analisis secara kualitatif ini lebih bersifat deskriptif.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, maka dapat dilihat dengan perhitungan (Hikmah, 1999) sebagai berikut :

1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yaitu:

   a. $$\frac{Pendapa\tan AsliDaerah(PAD)}{TotalPenerimaandaerah(TPD)}$$

   b. $$\frac{SumbanganDaerah(SD)}{TotalpenerimaanDaerah(TPD)}$$

   c. $$\frac{BagiHasilPajakdanBukanPajakuntukdaerah}{TotalPenerimaanDaerah}$$

Apabila hasil perhitungan Total Penerimaan Daerah (TPD) = PAD + BHPBP + SD besar maka desentralisasinya tinggi (mandiri), namun sebaliknya bila hasil perhitungannya kecil berarti derajat desentralisasinya rendah (kurang mandiri).

2. Kebutuhan Fiskal dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) dengan formula :

$$\text{IPPP} = \frac{PengeluaranAktualPerkapitaUntukJasa - JasaPublik(PPP)}{S\tan darKebutuhanFiskalDaerah(SKF)}$$

$$\text{SKF} = \frac{JumlahPengeluaranDaerah / JumlahPenduduk}{JumlahKabupaten / Kota}$$

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah.

Bila perhitungan Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar pula.

3. Kapasitas Fiskal dengan formula :

$$\text{F} = \frac{PDRB / JumlahPenduduk}{KapasitasFiskalS\tan dar(KFs)} \text{ X } 100\ \%$$

$$\text{KFs} = \frac{JumlahPDRB / JumlahPenduduk}{JumlahKabupaten / kota}$$

Bila hasil Kapasitas Fiskal (F) hasilnya semakin tinggi, ini berarti kapasitas fiskal suatu daerah akan semakin tinggi juga.

4. Upaya Fiskal atau posisi fiskal dapat menggunakan rumus :

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

semakin elastis Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, maka struktur Pendapatan Asli Daerah di daerah akan semakin baik.

1.8. Konsepsional Variabel Operasional

Guna mencapai keseragaman penafsiran atas variabel-variabel yang diteliti, maka penulis memberikan batasan definisi operasional variabel-variabel berikut ini:

a. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perunfang-undangan yang berlaku (UU no. 25, 1999; 119).

b. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (0tonomi daerah, 2001; 43).

c. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit-unit produksi dalam periode tertentu selama satu tahun (Partadiredja, 27).

d. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

e. Kebutuhan fiskal adalah pengeluaran pemerintahan untuk menyediakan barang-barang publik dan sejenisnya agar dapat dinikmati semua warga dalam suatu daerah atau juga dapat diartikan sebagai biaya pemeliharaan prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, kelembagaan pendidikan, dan pusat kesehatan (Uppal dan Suparmoko,1983:305).

f. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Otoda).

g. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Otoda, 1999; 97).

h. Kontribusi adalah sumbangan atau memberikan sumbangan.

i. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proposal, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (UU No. 25, 1999; 96).

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Ali, 2002, Kesiapan Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Menyongsong Era Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi*, Unsri, Palembang, Hal . 4-12.

Alisjahbana, Armida S, 1996, *Potensi dan Prospek Pengembangan PAD Propinsi Jawa Barat*, Makalah Seminar : Peningkatan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat Tk. I, diselenggarakan oleh Bappeda Propinsi Jawa Barat, 11 Maret 1996.

Anggaran, 2000, " Menata Reformasi Pengelolaan Anggaran ", *Majalah Keuangan Sektor Publik*, edisi 72, Jakarta, hal. 72-85.

Badan Pusat Statistik, 2004, Ogan Komering Ulu Dalam Angka Tahun 2004, BPS Sumatera Selatan.

Badan Pusat Statistik, 2004, Produk Domestik Regional Bruto Ogan Komering Ulu 2004. BPS Sumatera Selatan.

Badan Pusat Statistik, 2004, Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Selatan Dalam Angka 2004. BPS Sumatera Selatan.

Bamim, Selamat, 2002, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumsel*, Tesis, Palembang.

Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UGM, Yogyakarta, Hal. 21-36.

Mongkoessoebroto, Guritno, Dr. Eko, 1993, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.

Musyrif, 1999, Peranan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tk 1 Sumsel dalam Mengelolah Keuangan Daerah, *Jurnal Ekonomi*, Unsri, Palembang, Hal. 17-21.

Otonomi Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Riwo Kaho. Josep, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparmoko, 1982, *Asas-asas Keuangan Negara*, BPFE UGM, Yogyakarta.

Zahari Ms, M, 2001, *Analisis PAD Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah*, *Tesis*, Palembang.